

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada **April 2025** di Kabupaten Sumenep mengalami inflasi **year on year (yoy)** sebesar **1,53 persen** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,40. Tingkat inflasi **month to month (mtm)** sebesar **0,72 persen** serta tingkat inflasi **year to date (ytd)** sama angkanya yaitu sebesar **1,54 persen**. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2025 secara y-on-y adalah: Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,91%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Emas Perhiasan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,88%. Penyumbang utama Deflasi bulan Januari 2025 secara m-to-m adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil Deflasi sebesar 1,33%. Komoditas penyumbang utama Inflasi pada kelompok ini, yaitu : Tarif Listrik.

Pada **Mei 2025** di Kabupaten Sumenep mengalami inflasi **year on year (yoy)** sebesar **0,19 persen** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,53. Tingkat Deflasi **Month to Month (m-to-m)** sebesar **0,17 Persen** dan Tingkat Deflasi **Year to Date (y-to-d)** sebesar **1,08 persen**. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yoy yaitu : Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 1,31%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Emas Perhiasan; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Nasi dengan Lauk, Bakso Siap Santap dan Bubur; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,91 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,24 persen. Penyumbang utama Deflasi bulan Februari 2025 secara m-to-m adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil Deflasi sebesar 0,33%. Komoditas penyumbang utama Deflasi pada kelompok ini, yaitu : Tarif Listrik.

Pada **Juni 2025** di Kabupaten Sumenep mengalami inflasi **year on year (yoy)** sebesar **2,52 persen** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,21. Tingkat inflasi **month to month (mtm)** sebesar **0,62 persen** dan tingkat inflasi **year to date (ytd)** yaitu sebesar **1,37 persen**. Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 secara y-on-y adalah: Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 1,16%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Emas Perhiasan. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,77%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Beras, Sigaret Kretek Mesin dan Tomat. Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,22%. Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2025 secara m-to-m adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,48%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini, yaitu : Beras, Bawang Merah dan Tomat.

https://docs.google.com/document/d/1NwLbUv7a7VqggmAEHeTFggp-GbwElBD5/edit?usp=drive_link&ouid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Faktor yang mendorong kenaikan harga (inflasi) di Kabupaten Sumenep :

1. Hasil survey harga kebutuhan pokok di Pasar Anom dan Pasar Bangkal diperoleh data bahwa terdapat beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga namun juga ada yang tetap bahkan mengalami penurunan.
2. Komoditas penyumbang utama kenaikan Triwulan pertama adalah tarif listrik, bawang merah, cabe kecil/rawit, daging sapi, emas perhiasan, beras, telur ayam ras, daging ayam ras dan
3. Kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud diatas disebabkan :
 - Adanya peningkatan kebutuhan pokok masyarakat utamanya saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H ;
- Beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat lebih banyak didatangkan dari luar daerah diantaranya telur ayam broiler/ras dan daging ayam ras ;
- Meningkatnya biaya
4. Adanya perbedaan harga kebutuhan pokok antara Pasar Bangkal dan Pasar Anom disebabkan karena penjual di Pasar Bangkal untuk berjualan mereka kulakan terlebih dahulu ke Pasar Anom hal ini disebabkan pedagang besar hanya terpusat di tempat

https://docs.google.com/document/d/1NwLbUv7a7VqggmAEHeTFggp-GbwElBD5/edit?usp=drive_link&ouid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

5.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi TPID Kabupaten Sumenep terfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) :

1. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Internal Pemerintah Kabupaten Sumenep ;
2. Melakukan peninjauan guna pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat secara langsung ke pasar anom dan pasar bangkal ;
3. Menyusun Laporan langkah strategi pengendalian inflasi sebagai bahan telaah staf kepada Bupati ;
4. Menyelenggarakan Koordinasi dengan kecamatan terkait laporan perkembangan harga bahan pangan pokok masing masing kecamatan ;
5. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait laporan perkembangan harga bahan pangan pokok pada 2 pasar barometer BPS ;
6. Menyelenggarakan kerjasama dengan media dalam rangka pemberian informasi tentang rencana aplikatif pengendalian inflasi di Kabupaten Sumenep bagi Masyarakat (*sebagaimana terlampir*).

https://docs.google.com/document/d/1NwLbUv7a7VqggmAEHeTFggp-GbwElBD5/edit?usp=drive_link&ouid=102996212974420709183&rtpof=true&sd=true

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4.

Keterjangkauan Harga

Langkah Positif:

- Peninjauan harga ke pasar strategis (Pasar Anom dan Pasar Bangkal) sudah tepat sebagai barometer inflasi lokal.
- Koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait menunjukkan adanya sistem pelaporan harga.

Catatan:

- Belum terlihat ada intervensi harga seperti **operasi pasar murah**, subsidi transport, atau penguatan akses langsung ke produsen/petani.
 - Tidak disebutkan adanya pemanfaatan data digital/real-time untuk pemantauan harga harian.
-

2. Ketersediaan Pasokan

Langkah Positif:

- Pemantauan lapangan menunjukkan perhatian pada ketersediaan barang.

Catatan:

- Tidak dijelaskan strategi **cadangan stok pangan daerah**, ataupun kerja sama antar daerah (interkoneksi suplai).
 - Belum ada upaya spesifik dalam memperkuat ketahanan pangan lokal (seperti dukungan ke petani/nelayan).
-

3. Kelancaran Distribusi

Langkah Positif:

Peninjauan ke pasar secara tidak langsung turut memastikan distribusi berjalan.

Catatan:

- Belum ada kebijakan konkret menyangkut **efisiensi rantai distribusi**, perbaikan infrastruktur jalan, atau kemitraan dengan penyedia logistik.
-

4. Komunikasi Efektif

Langkah Positif:

- Kerja sama dengan media menunjukkan kesadaran pentingnya komunikasi publik terkait inflasi.

Catatan:

- Belum jelas apakah sudah ada **dashboard harga online**, edukasi masyarakat terkait konsumsi alternatif, atau narasi menenangkan saat terjadi lonjakan harga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. Tingkat Kabupaten (Internal)

1. Perluas Intervensi Harga:

- Gelar **Operasi Pasar Murah berkala**, khususnya saat momen rawan inflasi (Ramadhan, Idul Fitri, akhir tahun).
- Libatkan BUMDes/BUMD untuk penyaluran bahan pangan dengan margin rendah.

2. Bangun Sistem Pemantauan Harga Digital:

- Buat dashboard atau laporan harga harian berbasis web atau WhatsApp group yang terintegrasi dari kecamatan dan pasar barometer.

3. Penguatan Cadangan Pangan Lokal:

- Bentuk dan kelola **lumbung pangan desa/kecamatan** sebagai buffer stok saat
-

krisis.

4. Stabilisasi Distribusi dengan Dukungan Infrastruktur:

- Prioritaskan perbaikan jalan menuju sentra produksi dan pasar.
- Fasilitasi kerja sama distributor lokal agar logistik pangan lebih efisien.

5. Sinergi dengan Petani dan UMKM Pangan:

- Berikan insentif pupuk, bibit, dan alat produksi bagi petani strategis untuk menekan biaya produksi.

B. Tingkat Regional dan Kerja Sama Antar Daerah

1. Bangun Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota

- Sumenep bisa bekerja sama dengan daerah surplus komoditas pangan lain (misal Situbondo, Probolinggo) dalam **skema distribusi silang** untuk menjaga pasokan.

2. Dorong Integrasi Tim TPID dengan TPID Provinsi

- Agar intervensi kabupaten bisa terhubung dengan program inflasi provinsi (misal Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan - GNPIP).

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Kampanye Konsumsi Bijak & Alternatif Lokal

- Sosialisasi penggantian bahan pokok mahal dengan alternatif lokal (misal beras diganti jagung/singkong saat krisis pasokan).

2. Pelibatan Komunitas & RT/RW

- Ajak kelompok ibu PKK, karang taruna, dan RT untuk jadi **agen edukasi pangan** dan pemantau harga di lingkungannya.